

**DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



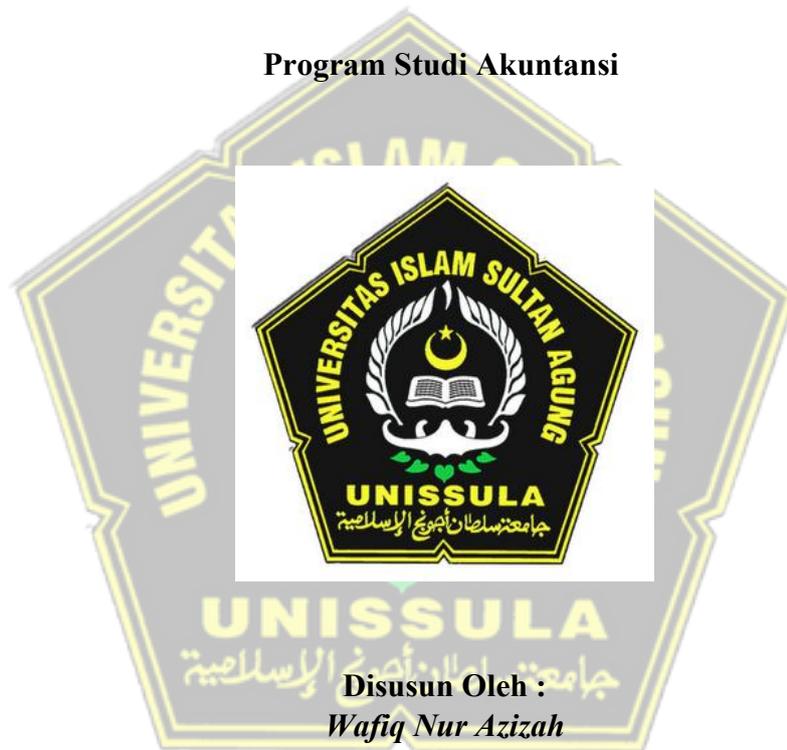
**Disusun Oleh :  
*Wafiq Nur Azizah*  
NIM : 31402300213**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

**DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :  
*Wafiq Nur Azizah*  
NIM : 31402300213**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

## Skripsi

# DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :

*Wafiq Nur Azizah*

NIM : 31402300213



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIK. 211403012

# DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :  
*Wafiq Nur Azizah*  
NIM : 31402300213

Telah dipertahankan di depan dosen review  
Pada tanggal 26 Mei 2025

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.  
NIK 211403012

Dosen Review,



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si.,  
Ak., CA  
NIK 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D  
NIK 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wafiq Nur Azizah  
NIM : 31402300213  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Wafiq Nur Azizah  
NIM. 31402300213

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan dalam pengerjaan usulan penelitian skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari para pihak sehingga dapat dijadikan semangat dan kekuaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Orang tua yang sangat penulis cintai atas dukungan, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama dalam penyusunan skripsi ini.
- 2) Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- 3) Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung dan Dosen Pembimbing.
- 4) Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kelancaran kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
- 5) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, M. Ibnu Soeyoeti, S.E., M.Si. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk

melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- 6) Seluruh teman penulis yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis sadar bahwa usulan penelitian skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca supaya usulan penelitian skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

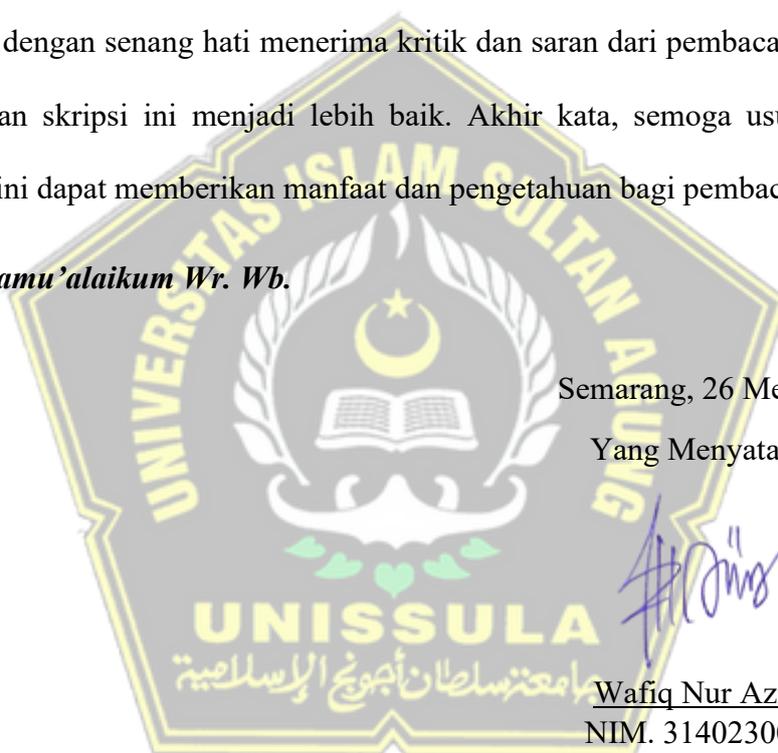
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Wafiq Nur Azizah  
NIM. 31402300213

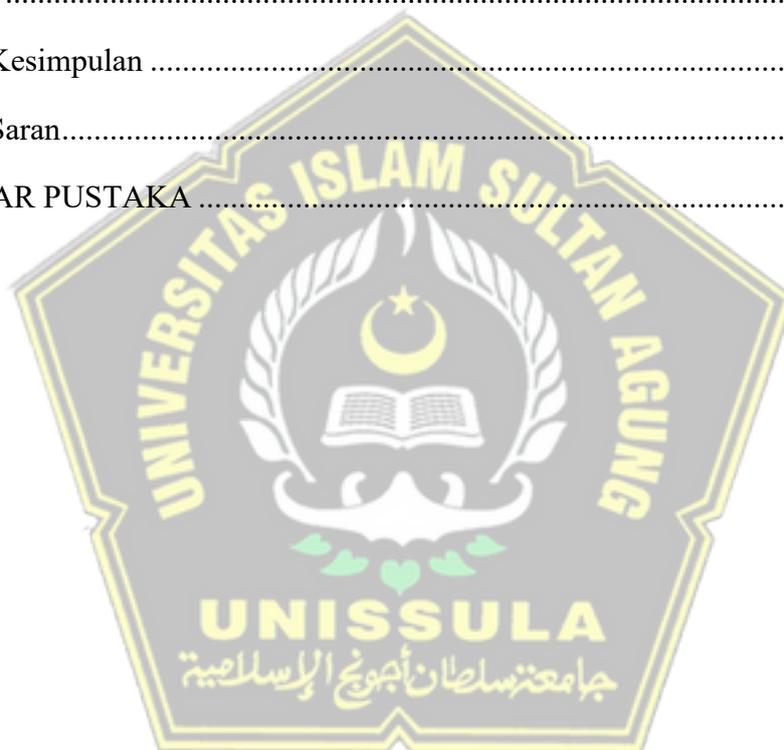


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori <i>Agency</i> .....	9
2.2 Variabel Penelitian .....	10
2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah .....	10
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	12
2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH) .....	13
2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) .....	14
2.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	15
2.3 Penelitian Terdahulu .....	16

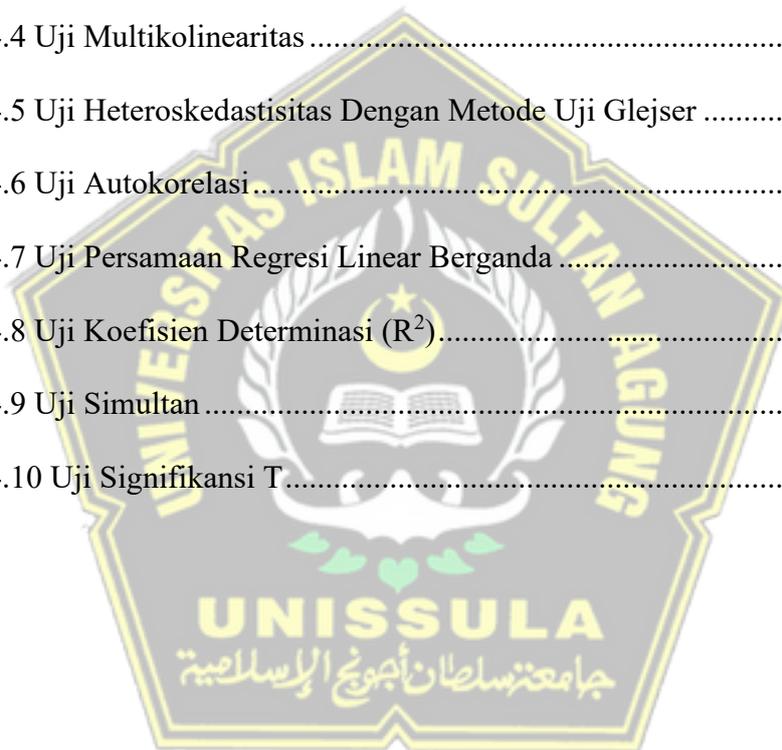
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	20
2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah .....	20
2.4.2 Pengaruh DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah .....	21
2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah .....	22
2.4.4 Pengaruh DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah .....	24
2.5 Kerangka Penelitian .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Populasi dan Sampel .....	26
3.2.1 Populasi Penelitian.....	26
3.2.2 Sampel Penelitian.....	26
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5 Variabel dan Indikator.....	27
3.5.1 Variabel Dependen.....	27
3.5.2 Variabel Independen .....	28
3.6 Teknik Analisis .....	29
3.6.1 Uji Asumsi Klasik .....	29
3.6.2 Model Analisis Data.....	32
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	33
BAB IV .....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	35

4.1.1 Profil Kabupaten Bojonegoro .....	35
4.1.2 Visi dan Misi .....	35
4.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....	37
4.2 Penyajian Data .....	38
4.3 Analisis Data .....	39
4.4 Pembahasan.....	53
BAB V.....	59
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator .....	28
Tabel 4.1 Visi dan Misi.....	36
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.3 Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	42
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas .....	43
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Uji Glejser .....	45
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.7 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda .....	47
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	49
Tabel 4.9 Uji Simultan .....	50
Tabel 4.10 Uji Signifikansi T.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi PAD dan DBH Migas 2015-2023 .....	3
Gambar 1.2 Tingkat Kemandirian Kabupaten Bojonegoro 2015-2023 .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	25
Gambar 4.1 Peta Wilayah Bojonegoro.....	35



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan. Dalam konteks ini, aspek keuangan menjadi unsur krusial yang tercermin melalui hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan, yang dikenal sebagai *intergovernmental fiscal relations*. Pelimpahan keuangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelimpahan keuangan tersebut meliputi pendelegasian pengeluaran dan pendelegasian pendapatan. Pelimpahan keuangan tersebut menjadi tolak ukur krusial dalam menilai apakah suatu daerah telah melaksanakan otonomi dengan baik (Hastuti, 2018).

Desentralisasi fiskal adalah suatu bentuk dampak dari penerapan otonomi daerah di Indonesia dengan tujuan untuk menggali dan meningkatkan kapasitas fiskal di tingkat lokal (Christia, 2019). Keberhasilan penerapan otonomi daerah bisa dinilai berdasarkan sejauh mana daerah mampu mengelola keuangannya secara efektif, yang dapat diukur melalui analisis atas laporan keuangan. Laporan yang dianalisis bisa disesuaikan dengan kebutuhan aspek apa yang ingin dinilai. Sebagai contoh, dalam laporan realisasi anggaran, dapat dianalisis mengenai kinerja pendapatan daerah dengan menghitung pertumbuhan realisasi pendapatan, mengevaluasi deviasi antara anggaran dan realisasi, menghitung rasio keuangan,

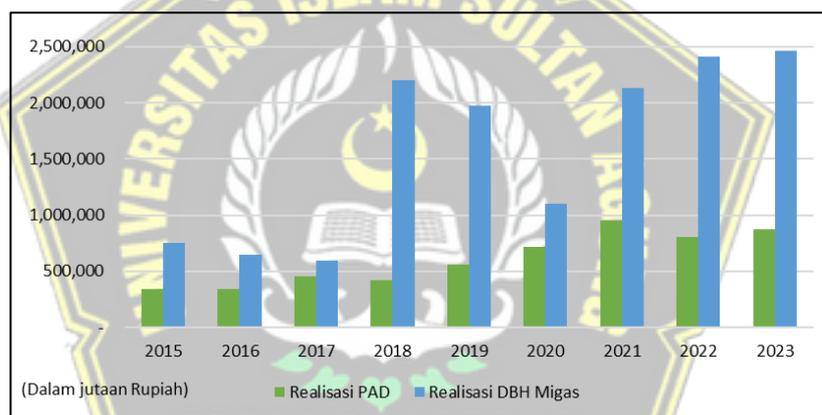
serta menilai potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan (Mahmudi, 2019). Analisis tersebut bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah.

Agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan secara optimal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam hal keuangan (Mahmudi, 2019). Tingginya kemandirian fiskal mengindikasikan bahwa suatu daerah dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan layanan publik secara mandiri dan memadai (Halim, 2014). Kemandirian keuangan suatu daerah umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu realisasi pendapatan asli daerah serta pendapatan lain dari pihak luar, seperti dana dari pusat maupun pinjaman antar pemerintah daerah.

Pada praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, pada Tahun 2019 terdapat 8 dari 34 Provinsi yang belum mandiri, dan terdapat 458 dari 497 Kabupaten/Kota yang belum mandiri. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian pada penelitian terdahulu terkait analisis kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Menurut hasil penelitian Zukhri (2020), tingkat kemandirian fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2016 hingga 2018 masih tergolong rendah. Situasi ini mencerminkan adanya hubungan yang bersifat konsultatif, di mana dominasi peran pemerintah pusat masih kuat, sementara pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahannya melalui pendapatan asli daerah. Penelitian Yulinchton, *et al.*, (2022) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah

Kabupaten Tegal dalam membiayai kebutuhan daerah masih rendah. Penelitian Endang Purwanti *et al.*, (2021) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan Kota Salatiga masih rendah.

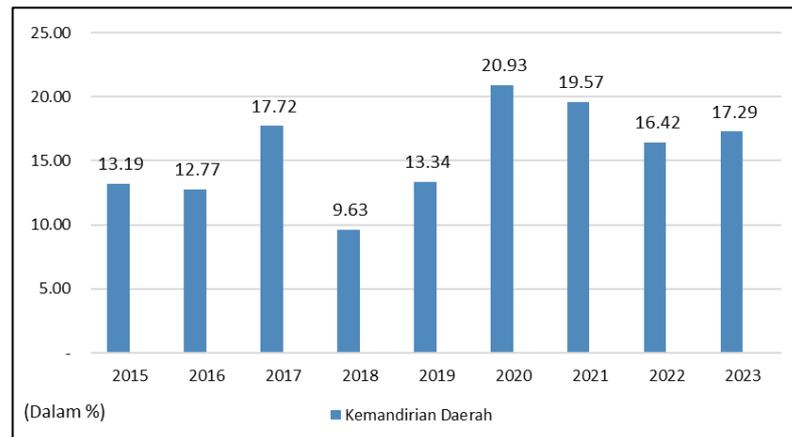
Pada Kabupaten Bojonegoro terdapat minyak dan gas bumi dengan potensi yang cukup besar. Sebagai daerah penghasil migas, Bojonegoro mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar. Hal tersebut menyebabkan DBH Migas menjadi komponen penyumbang penerimaan daerah Kabupaten Bojonegoro yang paling besar pada tahun 2015-2023 jauh melebihi PAD.



**Gambar 1.1 Realisasi PAD dan DBH Migas 2015-2023**

Sumber: Diolah penulis

Kesenjangan antara realisasi penerimaan PAD dengan DBH Migas tersebut mengindikasikan bahwa Bojonegoro sangat bergantung pada dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015-2023 yang masih berada pada level sangat rendah atau bersifat instruktif.



**Gambar 1.2 Tingkat Kemandirian Kabupaten Bojonegoro 2015-2023**

Sumber: Diolah penulis

Hubungan instruktif merupakan pola interaksi yang ditandai dengan dominasi kewenangan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana atas instruksi yang diberikan oleh pusat (Setiawan *et al.*, 2021). Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan, daerah seharusnya lebih bergantung pada penerimaan PAD daripada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Potensi PAD perlu dioptimalkan sebagai sumber daya dasar daerah untuk mendanai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya otonomi daerah. Peningkatan PAD umumnya sejalan dengan meningkatnya kemandirian fiskal, sebagaimana temuan dari Setiawan *et al.* (2021), Mahardika dan Fauzan (2022), Insani *et al.* (2024), Saleh (2020), serta Periansya (2019) yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, hasil studi Kusmila (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas daerah untuk mengelola potensi kekayaan yang ada.

Beberapa unsur dalam dana transfer pusat dengan potensi tinggi untuk memengaruhi kemandirian fiskal daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar nilai DBH, semakin tinggi ketergantungan daerah, yang mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Musfirati (2021), Rahayu et al. (2024), dan Nurrahmadani et al. (2024), yang menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan studi Andriana (2020) dan Periansya (2019), yang berkesimpulan DBH tidak berdampak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Penyebab perbedaan hasil ini diakibatkan oleh perbedaan besar kecilnya nilai DBH antar daerah serta efektivitas penggunaannya. Dalam beberapa kasus, pemanfaatan DBH belum sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi target pelayanan publik, dan belum mampu menghasilkan output yang berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Jika kemampuan fiskal suatu daerah rendah, maka daerah tersebut akan mendapat DAU yang relatif besar. Hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan DAU cenderung berbanding terbalik, semakin tinggi nilai DAU maka tingkat kemandirian daerah tersebut semakin rendah, DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan, sebagaimana penelitian Musfirati (2021), Mahardika & Fauzan (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa DAU memberikan pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan. Di sisi lain, DAU juga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila penggunaan DAU tidak semata digunakan untuk kebutuhan konsumtif, namun juga dialokasikan untuk

pembiayaan program yang berpotensi meningkatkan PAD. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Periansya (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain DBH dan DAU, pemerintah pusat juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui transfer DAK. Sesuai namanya, pemerintah pusat telah membagi penggunaan DAK dalam beberapa kategori khusus untuk mendorong pembangunan daerah. Tingginya DAK dapat mencerminkan bahwa ketergantungan daerah masih tinggi. Sehingga DAK akan berpengaruh negatif kepada kemandirian keuangan sebagaimana penelitian Rahayu *et al.*, (2024), dan penelitian Riyadi (2022). Sebaliknya, penelitian Musfirati (2021), dan Andriana (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa DAK secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan. Hasil tersebut didasarkan pada penggunaan DAK yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Penggunaan DAK yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat cukup optimal dalam menutup kesenjangan fiskal. DAK dapat menjadi pendorong optimalisasi PAD serta dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah jika digunakan dengan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kinerja keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi bisa dinilai dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan.

Dengan tuntutan untuk meningkatkan kemandiriannya, daerah seharusnya lebih bergantung pada penerimaan PAD daripada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Namun, terdapat banyak daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Pada Kabupaten Bojonegoro terdapat hasil alam minyak dan gas bumi yang menghasilkan tingginya alokasi penerimaan dana transfer pusat sebagai komponen penilaian kemandirian daerah. Tingginya alokasi penerimaan transfer tersebut harus disertai dengan peningkatan PAD untuk menunjang terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Sebagaimana kondisi permasalahan tersebut, perlu diuji secara empiris mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan?
- 2) Apakah Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan?
- 3) Apakah Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan?

- 4) Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis:

- 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan
- 2) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan
- 3) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemandirian keuangan
- 4) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

- 1) Sebagai dasar dan saran untuk pemerintah dalam mengembangkan strategi, kebijakan dan program untuk meningkatkan keberhasilan desentralisasi fiskal dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah
- 2) Dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih lanjut.
- 3) Memperluas wawasan penulis serta mengembangkan keterampilan penulis dalam mengelola studi literatur dan data menjadi pemikiran yang lebih berkembang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori *Agency***

Pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerah memiliki keterkaitan erat dengan konsep dalam teori *agency*. Teori ini menggambarkan hubungan kontraktual antara principal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat), dalam hal ini agen diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi milik principal. Dalam menjalankan tugasnya, agen berkewajiban mengoptimalkan kepentingan principal, namun pada saat yang sama, agen juga cenderung memperjuangkan kepentingannya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Zelmiyanti, 2016).

Dalam konteks pemerintahan daerah, konsep principal-agent memainkan peranan penting dalam hubungan pengelolaan keuangan. Principal dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan mandat atau kewenangan, yang dalam hal ini meliputi pemerintah pusat maupun masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama. Pemerintah pusat berperan sebagai principal yang mendelegasikan otoritas kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat juga bertindak sebagai principal melalui peran serta dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Sebagai agen, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan penuh akuntabilitas.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas ini berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pelaporan keuangan secara periodik kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, mekanisme pelaporan tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam menjembatani hubungan principal-agent demi terciptanya keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

Apabila pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah, maka secara otomatis ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan mengalami peningkatan. Ketergantungan yang tinggi tersebut berpotensi mengurangi motivasi serta kemampuan daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri. Lebih lanjut, ketergantungan yang berlebihan ini dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan keuangan daerah yang efisien. Dalam kerangka teori keagenan, kesuksesan pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskalnya. Dengan demikian, peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi suatu prasyarat penting agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi fiskalnya secara optimal dan berkelanjutan tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

Kapabilitas daerah untuk mencukupi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan layanan publik secara mandiri, tanpa ketergantungan yang

signifikan terhadap dukungan eksternal merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Kapasitas tersebut utamanya bersumber dari pendapatan yang dihimpun langsung oleh daerah, terutama melalui pajak dan retribusi yang berasal dari kontribusi masyarakat (Halim, 2014). Oleh karena itu, indikator sebagai alat ukur tingkat kemandirian fiskal adalah kontribusi PAD terhadap pendapatan yang berasal dari pihak lain.

Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat diukur dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, yang berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah untuk mendanai seluruh aktivitas operasional serta pelaksanaan program pembangunan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri tanpa bergantung secara signifikan pada dana dari pihak lain. Rasio ini menjadi ukuran penting dalam evaluasi keberlanjutan keuangan daerah serta efektivitas pengelolaan sumber daya fiskal di tingkat daerah (Rahayu et al., 2024). Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang kuat dan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pihak luar. Sebaliknya, rasio yang rendah menandakan tingginya ketergantungan fiskal terhadap transfer antar pemerintah. Rasio kemandirian fiskal mengindikasikan peran masyarakat dalam membangun daerah melalui pajak dan retribusi. Kemandirian yang tinggi merefleksikan kontribusi masyarakat yang signifikan dalam pembiayaan daerah, sekaligus menjadi indikator keberhasilan daerah dalam menggali potensi PAD secara optimal.

### 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari penerimaan daerah yang secara langsung bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Peran PAD sangat erat kaitannya dengan prinsip desentralisasi fiskal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan PAD tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertumpu pada pemanfaatan potensi lokal secara optimal (Periansya, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal semata, tetapi juga menjadi indikator utama yang mencerminkan kapasitas dan kemandirian suatu daerah. PAD menggambarkan sejauh mana daerah mampu mendayagunakan potensi ekonomi yang dimilikinya secara optimal tanpa harus bergantung secara signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD berperan sebagai tolok ukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program dan kebijakan publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Dalam kerangka otonomi daerah, PAD memiliki posisi strategis sebagai pilar utama yang memperkokoh fondasi kemandirian fiskal. Oleh karena itu, peningkatan PAD melalui berbagai strategi seperti inovasi kebijakan fiskal, intensifikasi proses pemungutan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, PAD dapat dipandang sebagai representasi nyata dari kualitas kinerja serta tata kelola keuangan daerah yang mampu menciptakan stabilitas fiskal dan kemandirian yang berkelanjutan.

### 2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan syarat tertentu dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penentuan besaran DBH memperhitungkan berbagai indikator kinerja yang relevan, dengan tujuan untuk memastikan distribusi dana dilakukan dengan adil dan tepat sasaran. Mekanisme ini berfungsi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Alokasi DBH diberikan baik kepada daerah penghasil maupun non-penghasil sumber pendapatan nasional.

Distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil dirancang dengan tujuan utama menciptakan struktur pembiayaan yang lebih adil dan proporsional. Melalui mekanisme ini, daerah penghasil mendapatkan bagian dana yang sebanding dengan kontribusi ekonominya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya secara lebih optimal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal serta memastikan bahwa manfaat dari potensi sumber daya daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, bagi daerah yang bukan penghasil, DBH memiliki peran strategis sebagai kompensasi atas dampak eksternalitas negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas ekonomi di daerah lain. Dana ini juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Dengan adanya DBH, pemerintah pusat berupaya mengurangi disparitas antar daerah, sehingga terwujud keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih

merata dan berkelanjutan di tingkat nasional. Oleh karena itu, DBH berperan sebagai mekanisme finansial dan alat kebijakan untuk memperkuat integrasi dan solidaritas antar wilayah.

Penetapan besaran DBH yang diterima oleh masing-masing daerah didasarkan pada realisasi pendapatan negara pada tahun anggaran sebelumnya, bukan berdasarkan estimasi atau proyeksi tahun berjalan. DBH Sumber Daya Alam berasal dari sektor-sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, seperti kehutanan, migas, panas bumi, pertambangan mineral, serta perikanan. Sementara itu, DBH Pajak mencakup pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak pusat. Klasifikasi ini penting dalam memahami struktur penerimaan transfer fiskal yang diterima pemerintah daerah dan bagaimana dana tersebut dialokasikan berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang berbeda.

#### **2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Tujuan utama dari alokasi DAU adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik antar daerah. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, sehingga daerah dapat memiliki kapasitas fiskal yang lebih proporsional dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan yang menjadi landasan utama dalam mendistribusikan sumber daya keuangan antar daerah. Dalam proses penyalurannya, pemerintah pusat mempertimbangkan secara cermat kebutuhan masing-masing daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan demikian, DAU berfungsi sebagai mekanisme fiskal dan

instrumen strategis untuk mengurangi disparitas antarwilayah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

DAU terdiri dari dua komponen utama yang memiliki karakteristik berbeda dalam penggunaannya. Komponen pertama adalah dana yang bersifat umum, di mana penggunaannya tidak diikat pada pos-pos tertentu sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sesuai prioritas lokal. Sementara itu, komponen kedua adalah dana yang penggunaannya telah diarahkan secara spesifik oleh pemerintah pusat, yang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi khusus ini umumnya diarahkan pada wilayah kelurahan atau desa, yang menjadi basis pelaksanaan pembangunan secara langsung di tingkat daerah secara menyeluruh.

#### **2.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk dana transfer yang dialokasikan secara spesifik untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah ditentukan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Dana ini berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam bidang-bidang strategis, serta memperkuat penyediaan layanan publik di tingkat daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki karakteristik *earmarked*, yang berarti bahwa penggunaannya telah ditetapkan secara spesifik oleh pemerintah pusat berdasarkan tujuan sektoral yang hendak dicapai. Penetapan penggunaan ini mengarahkan dana pada sektor-sektor prioritas tertentu, sehingga memberikan fokus

dan kejelasan dalam pelaksanaan program yang didanai, terutama pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar masyarakat.

Fokus utama dari DAK adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Selain berkontribusi dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, DAK juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjamin tersedianya layanan publik yang memadai dan merata. Dengan demikian, DAK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat daerah.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
1	(Setiawan <i>et al.</i> , 2021)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p><b>Variabel Independen:</b> X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK</p> <p><b>Sampel:</b> 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2016 (70 Sampel)</p> <p><b>Alat Analisis:</b> EViews (Regresi Data Panel)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU dan DAK tidak berpengaruh</li> <li>• PAD berpengaruh positif</li> </ul>
2	(Insani <i>et al.</i> , 2024)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Keuangan Daerah</p> <p><b>Variabel Independen:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif</li> <li>• Dana Perimbangan berpengaruh negatif</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Pertumbuhan Ekonomi X5 : Opini Audit <b>Sampel:</b> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (33 Sampel) <b>Alat Analisis:</b> Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Opini Audit memberikan hasil yang tidak signifikan</li> </ul>
3	(Musfirati, 2021)	<b>Variabel Independen</b> X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH X4 : Dana Keistimewaan <b>Variabel Dependen:</b> Tingkat Kemandirian Keuangan <b>Sampel:</b> Kabupaten/Kota di DIY <b>Alat analisis:</b> SPSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU berpengaruh signifikan negatif</li> <li>• DAK dan Dana Keistimewaan memberikan pengaruh positif</li> <li>• DBH berpengaruh negatif</li> </ul>
4	(Rahayu <i>et al.</i> , 2024)	<b>Variabel Independen</b> Pajak Daerah DBH DAK <b>Variabel Dependen:</b> Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah <b>Sampel:</b> Semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2022 <b>Alat analisis:</b> EViews	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah berpengaruh positif</li> <li>• DBH &amp; DAK berpengaruh negatif</li> </ul>
5	(Mahardika & Fauzan, 2022)	<b>Variabel Independen</b> X1 : PAD X2 : DAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif</li> <li>• DAU memberikan pengaruh negatif</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		<p>X3 : Belanja Modal</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p><b>Sampel:</b> Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah (82 Sampel)</p> <p><b>Alat analisis:</b> Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal tidak memberikan pengaruh</li> </ul>
6	(Saleh, 2020)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p><b>Variabel Independen</b> X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan</p> <p><b>Sampel:</b> LRA Kabupaten Bogor</p> <p><b>Alat analisis:</b> Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif</li> <li>• Dana perimbangan berpengaruh negatif</li> </ul>
7	(Nurrahmadani <i>et al.</i> , 2024)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan</p> <p><b>Variabel Independen</b> X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan X4 : Lain-lain PAD Yang Sah X5 : DBH</p> <p><b>Sampel:</b> 22 Kabupaten/Kota di NTT</p> <p><b>Alat analisis:</b> EViews</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif</li> <li>• DBH berpengaruh negatif</li> <li>• Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh</li> </ul>
8	(Andriana, 2020)	<p><b>Variabel Dependen:</b> Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p><b>Variabel Independen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU, DBH, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH X4 : Belanja Modal <b>Sampel:</b> 150 Kabupaten/Kota <b>Alat analisis:</b> Regresi Berganda menggunakan STATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAK secara signifikan berpengaruh positif</li> <li>• Variabel independen berpengaruh secara bersama-sama</li> </ul>
9	(Periansya, 2019)	<b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan Daerah <b>Variabel Independen</b> X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : PAD, DBH, DAU <b>Sampel:</b> 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (44 sampel) <b>Alat analisis:</b> Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU memberikan pengaruh positif</li> <li>• DBH tidak memberikan pengaruh</li> <li>• PAD, DBH, dan DAU berpengaruh secara simultan</li> </ul>
10	(Riyadi, 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan Daerah <b>Variabel Independen</b> X1 : PAD X2 : DAK X3 : Belanja Modal <b>Sampel:</b> 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat <b>Alat analisis:</b> SPSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU tidak memberikan pengaruh</li> <li>• Belanja modal berpengaruh negatif</li> <li>• DAK berpengaruh negatif</li> </ul>
11	(Kusmila, 2023)	<b>Variabel Independen</b> X1 : PAD X2 : Belanja Modal <b>Variabel Dependen:</b> Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD tidak berpengaruh secara signifikan</li> <li>• Belanja modal belanja modal berpengaruh secara tidak signifikan</li> </ul>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Alat Analisis	Hasil
		<p><b>Sampel:</b> LRA Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020</p> <p><b>Alat analisis:</b> Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS</p>	

Sumber: Diolah penulis

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### 2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihimpun oleh suatu daerah sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Potensi tersebut meliputi aspek ekonomi lokal, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta kapasitas fiskal yang tercermin dari struktur dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Daerah yang memiliki basis ekonomi yang kuat, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta kemampuan administrasi fiskal yang mumpuni umumnya mampu mengoptimalkan penerimaan PAD secara lebih maksimal. Dengan demikian, perbedaan antar daerah dalam menghimpun PAD sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki secara efisien dan berkelanjutan.

Peningkatan kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik mencerminkan tingginya tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Hal tersebut menjadi indikator penting dari kematangan otonomi

fiskal, sesuai dengan temuan Setiawan et al. (2021), Mahardika dan Fauzan (2022), Saleh (2020), serta Periansya (2019), yang menunjukkan konsistensi dalam menyatakan bahwa PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas basis PAD melalui inovasi kebijakan fiskal, peningkatan kepatuhan pajak, serta pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat terwujudnya kemandirian daerah secara menyeluruh.

**H1 : PAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **2.4.2 Pengaruh DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah kontributor utama dalam struktur pendapatan daerah sebagai bentuk pembagian penerimaan negara kepada daerah atas pemanfaatan sumber daya tertentu. DBH memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerah, khususnya bagi wilayah yang belum mampu sepenuhnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dominasi DBH dalam struktur pendapatan juga mengandung risiko ketergantungan fiskal yang tinggi. Ketika proporsi DBH dalam pendapatan daerah semakin besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan pembiayaan masih dipenuhi oleh dana eksternal. Ketergantungan ini menjadi cerminan dari rendahnya efektivitas daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal yang seharusnya dapat menjadi sumber utama penerimaan yang berkelanjutan.

Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal internal dan kurangnya upaya optimalisasi PAD sebagai instrumen utama dalam otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, fenomena ini merupakan tantangan serius karena bertentangan dengan semangat kemandirian yang diusung oleh otonomi daerah. Sejumlah studi empiris, seperti yang dilakukan oleh Musfirati (2021), Rahayu et al. (2024), dan Nurrahmadani et al. (2024), secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DBH justru memberikan dampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat menghambat pertumbuhan kapasitas fiskal lokal, serta menurunkan motivasi daerah untuk melakukan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber pendapatan sendiri. Oleh karena itu, penguatan PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap DBH menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi keuangan daerah yang berkelanjutan dan otonom.

**H2 : DBH berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung kebutuhan fiskal pemerintah daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan akses ke sumber pendanaan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien di

tingkat daerah. Besaran dana yang dialokasikan melalui DAU secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, DAU sering kali menjadi andalan utama dalam struktur pendapatan daerah, yang pada satu sisi memberikan keringanan fiskal, namun di sisi lain juga dapat menciptakan ketergantungan finansial yang signifikan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dapat menjadi indikator rendahnya kemandirian fiskal suatu daerah, di mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran secara mandiri masih sangat terbatas. Daerah belum dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Musfirati (2021) serta Mahardika dan Fauzan (2022) secara konsisten menemukan bahwa alokasi DAU memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut menegaskan bahwa meskipun DAU sangat penting sebagai instrumen pendukung fiskal, ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pusat dapat menghambat upaya daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal internal, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada DAU.

**H3 : DAU berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **2.4.4 Pengaruh DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen keuangan yang diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar bagi masyarakat sekaligus mempercepat proses pembangunan di tingkat daerah. Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sektoral dan prioritas pembangunan tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan demikian, DAK memegang peranan strategis dalam memastikan terselenggaranya program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengentasan kesenjangan antar wilayah. Namun, meskipun manfaatnya signifikan, tingginya alokasi DAK yang diterima oleh suatu daerah juga dapat menjadi cerminan ketergantungan fiskal yang cukup besar terhadap pemerintah pusat, yang pada akhirnya mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola sumber pendapatan sendiri masih belum optimal.

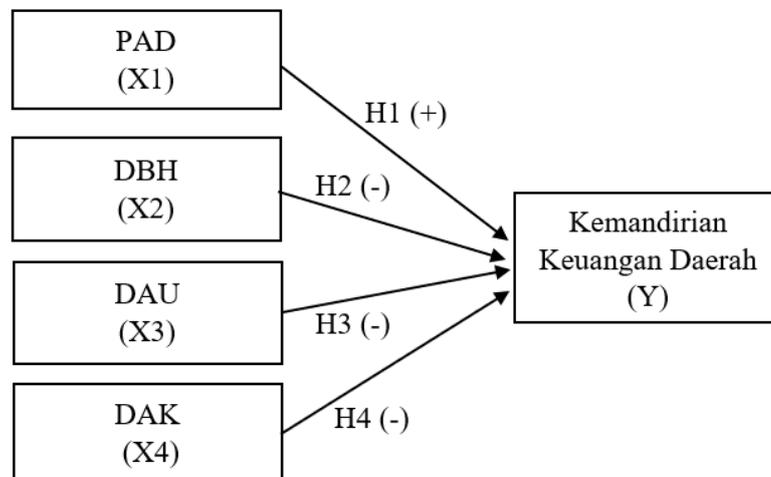
Fenomena ketergantungan yang tinggi terhadap DAK ini memiliki implikasi negatif terhadap kemandirian fiskal dan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Ketergantungan berlebih pada dana transfer semacam DAK mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengembangkan PAD serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Rahayu et al. (2024) dan Riyadi (2022), yang secara konsisten menunjukkan bahwa DAK memberikan dampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut menegaskan pentingnya upaya strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui diversifikasi sumber

pendapatan serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan mendorong terciptanya otonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

**H4 : DAK berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.**

### 2.5 Kerangka Penelitian

Variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diposisikan sebagai variabel independen.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**  
**Determinan Pendapatan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten**  
**Bojonegoro**

Sumber: Diolah penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, data diolah dalam bentuk numerik untuk tujuan analisis. Pendekatan kuantitatif dapat dikategorikan menjadi penelitian deskriptif, korelasional, ataupun asosiatif, tergantung pada tujuan dan metode analisis yang diterapkan dalam studi tersebut (Swarjana, 2022).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan subjek, kasus, atau objek yang menjadi fokus analisis dan dari mana temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan yang berlaku secara umum (Swarjana, 2022). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

##### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel merujuk pada subset yang dipilih secara sistematis dari populasi melalui metode sampling tertentu (Swarjana, 2022). Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro secara triwulanan, mulai dari tahun 2015 hingga 2023, dengan total 36 sampel.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dikumpulkan secara sekunder dari Laporan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro periode 2015-2023. Laporan tersebut dirinci per triwulan khususnya pada PAD, DBH, DAU, dan DAK. Data didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Data yang diperlukan adalah Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2023.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder guna menunjang efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup observasi terhadap dokumen resmi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, serta penelusuran data sekunder tambahan seperti dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, surat kabar, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### **3.5 Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang mengalami perubahan atau dipengaruhi secara langsung oleh variabel independen, sehingga variabel dependen merupakan hasil atau konsekuensi dari variasi yang terjadi pada variabel independen (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, dan DAK.

**Tabel 3.1 Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<b>Variabel Dependen</b>			
1.	Kemandirian Keuangan	Indikator yang dimanfaatkan untuk menilai kapabilitas daerah dalam menjalankan otonomi.  (Aslindar & Hapsari, 2022)	Menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2019)  $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$
<b>Variabel Independen</b>			
1.	PAD	Pendapatan yang didapatkan oleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  (UU Nomor 1 Tahun 2022)	Diukur dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022)  $= (\text{Penerimaan PAD} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$
2.	DBH	Transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dan Daerah lain nonpenghasil.  (UU Nomor 1 Tahun 2022)	Diukur dengan mencari kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah (Nurrahmadani <i>et al.</i> , 2024)  $= (\text{Penerimaan DBH} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$
3.	DAU	Transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar-Daerah.  (UU Nomor 1 Tahun 2022)	Pengukuran DAU dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022)  $= (\text{Penerimaan DAU} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
4.	DAK	Bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai program prioritas nasional serta mendukung pelaksanaan layanan publik secara operasional.  (UU Nomor 1 Tahun 2022)	Diukur dengan mencari kontribusi DAK terhadap pendapatan daerah (Setiawan <i>et al.</i> , 2021)  = (Penerimaan DAK / Total Pendapatan) X 100%

Sumber: Diolah penulis

### 3.6 Teknik Analisis

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan menganalisis nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat validitas secara statistik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menghindari potensi permasalahan dalam model, seperti adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang dapat mengganggu ketepatan hasil estimasi.

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah nilai residual dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal. Data penelitian yang ideal biasanya memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal, di mana mayoritas nilai residual terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji ini

dievaluasi berdasarkan nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh, yang kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%. Secara statistik, suatu kumpulan data dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansinya melebihi ambang batas 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi yang diperoleh berada di bawah angka 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. Kriteria ini umum digunakan dalam uji normalitas untuk menentukan apakah asumsi distribusi normal dalam analisis regresi atau model statistik lainnya telah terpenuhi.

### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam suatu model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat mengganggu keabsahan hasil analisis regresi, sehingga pengujian ini menjadi hal yang penting dilakukan. Penilaian dilakukan dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF); apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat indikasi adanya masalah multikolinearitas pada model regresi (Diana, 2020).

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan sebagai langkah untuk menilai kestabilan varians dari residual atau galat pada model regresi. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidakhomogenan varians, yaitu kondisi di mana varians residual tidak konstan di seluruh rentang nilai observasi. Ketidakterpenuhinya asumsi homoskedastisitas ini dapat mengindikasikan adanya gangguan dalam model yang berpotensi menurunkan validitas hasil estimasi, sehingga penting untuk mendeteksinya sejak awal guna menjamin reliabilitas

analisis regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini sangat penting guna memastikan keandalan serta validitas hasil analisis regresi (Sari, 2017). Heteroskedastisitas merupakan kondisi yang berlawanan dengan homoskedastisitas, di mana varians residualnya tetap konstan. Sebuah model regresi berganda dianggap baik apabila tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan kriteria :

1. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
2. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas

#### **3.6.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara nilai residual pada periode tertentu ( $t$ ) dengan nilai residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) dalam suatu model regresi linier (Ghozali, 2018). Kehadiran korelasi tersebut menunjukkan adanya permasalahan autokorelasi, yang mencerminkan bahwa residual tidak bersifat independen antar observasi. Ketergantungan residual ini mengindikasikan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, yaitu bahwa error harus bersifat acak dan tidak saling berkaitan. Model regresi seharusnya bebas autokorelasi, karena keberadaannya dapat memengaruhi keakuratan estimasi parameter dan menyebabkan bias dalam penarikan kesimpulan dari hasil analisis. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Run test* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, disimpulkan terdapat autokorelasi
2. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih dari 0,05, disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Regresi linear berganda dianggap sesuai untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara variabel independen dan dependen. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan untuk mengetahui kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y$  = Kinerja Keuangan

$\alpha$  = Intersep (konstanta)

$\beta$  = Koefisien regresi variabel independen

$X_1$  = PAD

$X_2$  = DBH

$X_3$  = DAU

$X_4$  = DAK

$\varepsilon$  = Error (kesalahan acak)

### **3.6.4 Uji Kelayakan Model**

#### **3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi sebagai indikator untuk menilai kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai  $R^2$  berada dalam rentang antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), semakin besar nilai  $R^2$  yang diperoleh, maka semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

#### **3.6.4.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F digunakan untuk menilai signifikansi kolektif dari semua variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Model regresi dianggap signifikan atau memiliki Goodness of Fit apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F-hitung melebihi F-tabel. Sebaliknya, jika F-hitung lebih rendah dari F-tabel dan nilai signifikansi melebihi ambang batas 5%, maka model dianggap tidak signifikan secara simultan.

### **3.6.5 Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.5.1 Uji Parsial (Uji Signifikansi T)**

Dalam kajian ini, proses pengujian hipotesis dilakukan dengan menerapkan metode t-test, yang juga dikenal sebagai uji signifikansi parsial. Melalui uji ini, dapat diketahui sejauh mana signifikansi statistik dari setiap variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat, tanpa memperhitungkan pengaruh variabel independen lainnya. Melalui metode ini, dapat diidentifikasi variabel mana yang secara signifikan memengaruhi perubahan pada variabel terikat (Jauharriah, 2022). Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

apabila nilai t-hitung melebihi t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil atau sama dengan t-tabel dan nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka hipotesis ditolak.



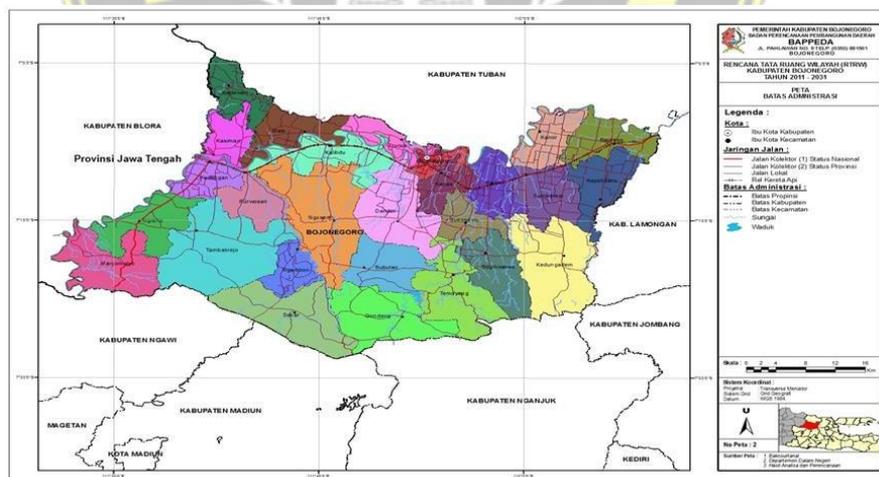
## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Profil Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro berada di Provinsi Jawa Timur dan terletak pada koordinat antara 6°59' hingga 7°37' Lintang Selatan serta 112°25' hingga 112°09' Bujur Timur, berjarak sekitar 110 kilometer dari ibu kota provinsi. Wilayah ini memiliki luas sekitar 231.125 hektare. Secara administratif, Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Sebagian besar kawasan di kabupaten ini didominasi oleh lahan pertanian.



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Bojonegoro**

Sumber : RPJMD Bojonegoro

##### 4.1.2 Visi Misi

Visi Kabupaten Bojonegoro mencerminkan arah pembangunan atau kondisi daerah yang diinginkan pada masa depan (*desired future*) sesuai Misi yang

diemban. Dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan dinamika perubahan paradigma dan tantangan yang berpotensi terjadi di masa mendatang, Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap proses transformasi di tingkat regional, nasional, maupun global.

Dalam konteks tersebut, misi memiliki peranan penting sebagai pernyataan strategis yang memuat gambaran umum mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk merealisasikan visi. Misi juga berfungsi untuk menguraikan tujuan yang hendak dicapai serta target yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Sebagaimana pengertian tersebut, maka visi dan misi Kabupaten Bojonegoro:

**Tabel 4.1 Visi dan Misi**

VISI	MISI
Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal</li> <li>2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab</li> <li>3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan</li> <li>4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa</li> <li>5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif</li> <li>6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</li> <li>7. Mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang merata dan ramah lingkungan</li> </ol>

Sumber : RPJMD Bojonegoro

### 4.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, distribusi pemanfaatan lahan, serta potensi yang dimiliki, Kabupaten Bojonegoro memiliki sejumlah peluang pengembangan wilayah yang dapat diidentifikasi dan dioptimalkan. Kawasan lindung berfungsi sebagai perlindungan ekosistem dan keberadaannya perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Sementara itu, kawasan budidaya ditetapkan sebagai wilayah yang dapat dimanfaatkan secara aktif untuk kegiatan produktif berdasarkan kondisi wilayah, potensi sumber daya manusia, serta infrastruktur buatan yang tersedia. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bojonegoro difokuskan pada kawasan budidaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Potensi Hutan

Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi hutan yang cukup signifikan, menjadikannya sebagai salah satu sektor strategis dalam pengembangan wilayah. Berdasarkan aspek pengelolaan dan kewenangan, hutan di daerah ini terbagi menjadi hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani melalui struktur organisasi seperti Satuan Pemangkuan Hutan (SPH) dan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH), sementara hutan rakyat dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal dengan pendekatan berbasis komunitas. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme dalam sistem pengelolaan hutan di Bojonegoro sesuai dengan otoritas yang menaunginya.

#### b. Potensi Pertanian

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi di bidang pertanian. Pemerintah

daerah secara aktif berupaya dan berinovasi untuk mengukuhkan posisi Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional dengan fokus pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya.

Luas lahan sawah di Kabupaten Bojonegoro mencapai 76.916 hektar dengan produksi padi sebesar 963.137,12 ton pada tahun 2017. Kondisi wilayah yang mendukung, termasuk iklim, ketersediaan lahan, dan sumber daya alam, menjadi faktor utama dalam pengembangan usaha pertanian, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah sangat signifikan, sehingga pengembangan sektor ini akan terus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan masa depan.

c. Potensi Pertambangan

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi pertambangan yang meliputi berbagai mineral non-logam dan batuan. Wilayah ini juga kaya akan migas (minyak bumi dan gas alam). Cadangan minyak diperkirakan mencapai antara 600 juta hingga 1,4 miliar barel, sementara cadangan gas berkisar antara 1,7 hingga 2 triliun kaki kubik. Potensi migas tersebut termasuk yang terbesar di Indonesia.

#### **4.2 Penyajian Data**

Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 36 sampel yang berasal dari Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro per triwulan dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Sumber data pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015-2023. Laporan tersebut dirinci per triwulan khususnya pada PAD, DBH, DAU, dan DAK. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	5.73	30.37	14.2939	6.78991
X2	36	2.83	69.84	40.3611	15.98547
X3	36	1.91	3.84	3.0582	.50692
X4	36	-3.00	2.60	1.3582	1.02884
Y	36	1.81	3.79	2.7196	.52952
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Diolah dari SPSS 26

- a. Variabel independen PAD menunjukkan nilai minimum sebesar 5,73 dan nilai maksimum mencapai 30,37. Rata-rata (mean) dari variabel ini tercatat sebesar 14,2939, yang mencerminkan kecenderungan umum data dalam periode pengamatan. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 6,78991 mengindikasikan tingkat penyebaran atau variasi data PAD terhadap nilai rata-ratanya, yang berarti terdapat fluktuasi yang cukup besar antar observasi dalam sampel yang dianalisis.

- b. Variabel independent DBH menunjukkan nilai minimum sebesar 2,83 dan nilai maksimum mencapai 69,84 dalam rentang observasi yang dianalisis. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini tercatat sebesar 40,3611, yang menggambarkan nilai tengah kecenderungan distribusi data. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 15,98547 mencerminkan tingkat dispersi atau keragaman data DBH terhadap rata-ratanya, yang mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi antar unit pengamatan dalam hal penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut..
- c. Variabel independen dana alokasi umum (DAU) menunjukkan nilai minimum sebesar 1,91 dan nilai maksimum sebesar 3,84, berdasarkan hasil deskriptif data yang dianalisis. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini tercatat sebesar 3,0582, yang merepresentasikan kecenderungan umum dari distribusi DAU dalam sampel penelitian. Selain itu, standar deviasi sebesar 0,50692 mengindikasikan tingkat sebaran data terhadap nilai rata-rata tersebut, yang menunjukkan bahwa variasi antar satuan observasi dalam hal penerimaan DAU berada dalam kisaran yang relatif moderat.
- d. Setelah dilakukan pengujian pada SPSS 26, terdapat gejala heteroskedasitas. Dalam kasus ini, penulis melakukan transformasi data dengan metode logaritma natural (LN). Sehingga nilai minimum variabel X4 atau Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi -3,00, nilai maksimum senilai 2,60, mean 1,3582, dan standar deviasi 1,02884.
- e. Variabel dependen kemandirian keuangan menunjukkan nilai maksimum sebesar 2,79 dan nilai minimum sebesar 1,81 pada periode observasi yang

dianalisis. Mean dari variabel ini tercatat 2,7196, yang mencerminkan kecenderungan sentral dari data kemandirian fiskal antar daerah dalam sampel. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,52952 mengindikasikan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya, yang menandakan adanya variasi yang relatif sedang dalam kapasitas kemandirian keuangan antar unit pemerintah daerah yang diteliti.

- f. Secara keseluruhan, seluruh variabel menunjukkan karakteristik sebaran yang mendekati normal, ditunjukkan oleh standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya.

#### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Data dianggap memenuhi kriteria kelayakan analisis lanjutan apabila sebaran residunya mengikuti distribusi normal atau mayoritas nilainya berada di sekitar rata-rata. Kesesuaian distribusi residual dengan distribusi normal merupakan salah satu syarat penting dalam regresi, karena memastikan validitas interpretasi hasil estimasi model.

Berikut hasil pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*:

**Tabel 4.3 Uji Normalitas: *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08921216
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.091
	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut berada di atas batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa residual model dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Temuan ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak secara statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Keberadaan multikolinearitas dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam estimasi parameter model dan mengganggu validitas interpretasi terhadap koefisien regresi yang dihasilkan. Berikut hasil pengujian multikolinieritas :

**Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.481	2.078
X2	.244	4.093
X3	.362	2.765
X4	.621	1.611

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tolerance sebesar 0,481 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 2,078. PAD tidak menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat dengan variabel independen lainnya dalam model, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi bebas multikolinearitas telah terpenuhi.
- b. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,244 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 4,093. Kedua nilai ini masih dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, variabel DBH memenuhi asumsi bebas multikolinearitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka model yang telah dibangun.
- c. Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai tolerance sebesar 0,362 dan nilai VIF sebesar 2,765, yang masih berada dalam batas ambang wajar yang digunakan dalam uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi korelasi tinggi

antara variabel DAU dengan variabel independen lainnya dalam model. Dengan kata lain, variabel DAU memenuhi asumsi non-multikolinearitas, sehingga tidak memengaruhi validitas hasil estimasi regresi.

- d. Sementara itu, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,621 dan nilai VIF sebesar 1,611. Kedua nilai tersebut berada dalam rentang yang aman. Tolerance melebihi ambang batas minimum 0,1 serta VIF di bawah batas maksimum 10, sehingga variabel DAK tidak mengalami masalah multikolinearitas.

#### **4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas dalam model regresi. Ketidakkonsistenan varians residual, atau yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam estimasi parameter regresi. Dalam penelitian ini, deteksi terhadap kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas dilakukan melalui metode Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual terhadap seluruh variabel independen yang digunakan dalam model, guna mengidentifikasi ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi dasar homoskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji glejser:

**Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Uji Glejser**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.082	.161		.508	.615
	X3	-.012	.030	-.105	-.381	.706
	X4	-.016	.011	-.299	-1.426	.164
	X1	.003	.002	.351	1.475	.150
	X2	6.206E-5	.001	.018	.053	.958

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Jika sig. (p-value) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

- a. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel PAD adalah sebesar 0,150, yang lebih besar dari batas kritis 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Dengan demikian, variabel PAD memenuhi asumsi homoskedastisitas, varians residual model konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen ini.
- b. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independen Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar 0,958, yang melebihi ambang batas signifikansi 0,05. Varians residual untuk variabel DBH bersifat homogen dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel tersebut, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

- c. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,706, yang berada di atas batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas pada variabel DAU. Dengan demikian, varians residual yang terkait dengan variabel ini dianggap homogen, sehingga asumsi homoskedastisitas pada model tetap terpenuhi.
- d. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independen Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 0,164, yang melebihi batas kritis 0,05. Syarat bebas homoskedastisitas terpenuhi, yang berarti varians residual tetap konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel tersebut.

#### 4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pola sistematis pada residual suatu model regresi, yang bisa mengindikasikan pelanggaran terhadap asumsi independensi residual. Salah satu metode non-parametrik yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah Run Test, yang mengevaluasi urutan (sequence) nilai residual apakah terjadi secara acak atau membentuk pola tertentu.

Berikut hasil pengujian autokorelasi menggunakan Run Test:

**Tabel 4.6 Uji Autokorelasi**

Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	.02172
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	15
Z	-1.184
Asymp. Sig. (2-tailed)	.237

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Nilai signifikansi sebesar 0,237 (lebih besar dari angka 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa urutan residual bersifat acak dan tidak membentuk pola sistematis, sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model. Dengan demikian, asumsi independensi residual terpenuhi dan model regresi mencukupi syarat untuk digunakan dalam analisis inferensial lanjutan.

### 4.3.3 Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Berikut hasil pengujian persamaan regresi linear berganda :

**Tabel 4.7 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.399	.280		5.002	.000
	X1	.078	.003	.996	22.826	.000
	X2	.001	.002	.034	.563	.578
	X3	.045	.053	.043	.853	.400
	X4	.020	.020	.039	1.019	.316

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Sehingga persamaan regresi linear berganda menjadi:

$$Y = 1,399 + 0,078 (PAD) + 0,001 (DBH) + 0,045 (DAU) + 0,020 (DAK)$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta atau intercept sebesar 1,399 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan bernilai nol, maka nilai prediksi untuk variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah, adalah sebesar 1,399 satuan. Dengan kata lain, angka ini merepresentasikan nilai dasar kemandirian keuangan sebelum pengaruh variabel-variabel bebas tersebut diperhitungkan dalam model regresi.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,078 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada PAD akan berkontribusi pada peningkatan nilai kemandirian keuangan sebesar 0,078 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tetap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar 0,001, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada DBH hanya memberikan kontribusi peningkatan sebesar 0,001 satuan terhadap kemandirian keuangan. Nilai ini menunjukkan bahwa walaupun arah pengaruhnya positif, besaran kontribusi DBH

terhadap tingkat kemandirian keuangan relatif sangat kecil. Pengujian signifikansi statistik dari pengaruh variabel ini perlu dilakukan untuk menilai relevansi kontribusinya dalam model.

- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,045 menunjukkan bahwa peningkatan sebesar satu satuan pada DAU akan berdampak pada kenaikan kemandirian keuangan sebesar 0,045 satuan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat sebesar 0,020, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada DAK akan menghasilkan kenaikan sebesar 0,020 satuan pada tingkat kemandirian keuangan.

#### 4.3.4 Uji Kelayakan Model

##### 4.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

**Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 <sup>a</sup>	.972	.968	.09479

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) senilai 0,972. Angka tersebut merepresentasikan bahwa sebesar 97,2% dari total variasi yang terjadi dalam tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan secara simultan oleh

keempat variabel independen yang dianalisis, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan 2,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

Sementara itu, Adjusted R<sup>2</sup> senilai 0,968 menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Model yang digunakan dapat dikatakan layak dan relevan dalam menjelaskan pengaruh berbagai faktor fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,968 menunjukkan adanya penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Angka ini tetap mengindikasikan bahwa model regresi yang diterapkan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Dengan demikian, model dianggap valid dan relevan untuk menggambarkan pengaruh berbagai faktor fiskal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Berikut hasil Uji Simultan (Uji F) pada penelitian ini:

**Tabel 4.9 Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.535	4	2.384	265.288	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.279	31	.009		
	Total	9.814	35			

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Diperoleh nilai F hitung sebesar 265,288, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,68, dan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial atau uji signifikansi t. Prosedur ini digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji T pada penelitian ini:

**Tabel 4.10 Uji Signifikansi T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.399	.280		5.002	.000
	X1	.078	.003	.996	22.826	.000
	X2	.001	.002	.034	.563	.578
	X3	.045	.053	.043	.853	.400
	X4	.020	.020	.039	1.019	.316

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan koefisien regresi sebesar 0,078 dengan tingkat signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Nilai statistik t-hitung sebesar 22,826, jauh lebih besar dibandingkan nilai t-tabel senilai 2,03951. Hasil ini menegaskan bahwa secara parsial, PAD memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, menunjukkan kontribusi yang kuat dan bermakna dalam model regresi yang dianalisis.
- b. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (DBH) senilai 0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,578 ( $p > 0,05$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara parsial, DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, kontribusi DBH dalam model regresi tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk memengaruhi variabel dependen secara bermakna.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) memperoleh koefisien regresi sebesar 0,045 disertai dengan nilai signifikansi sebesar 0,400 ( $p > 0,05$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa secara parsial, DAU tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kontribusi DAU dalam model regresi ini tidak cukup kuat untuk memengaruhi variabel dependen secara bermakna.
- d. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,020 dengan tingkat signifikansi 0,316 ( $p > 0,05$ ), sehingga DAK tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara

parsial terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kontribusi DAK dalam model ini tidak cukup kuat untuk memengaruhi variabel dependen secara bermakna.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,078, dengan tingkat signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ) dan nilai t-hitung sebesar 22,826, yang jauh melebihi nilai t-tabel sebesar 2,03951. Hasil ini mengindikasikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, setiap peningkatan dalam PAD secara langsung akan meningkatkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahannya secara mandiri.

Pengaruh positif ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan mendasar. PAD sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah, baik dalam aspek penggalan, pemungutan, maupun pemanfaatannya. Ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalkan apabila daerah memiliki kontribusi PAD yang kuat. PAD mencerminkan tingkat produktivitas ekonomi dan efektivitas tata kelola daerah.

Besarnya PAD menandakan bahwa daerah memiliki kapasitas ekonomi lokal yang berkembang, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengeksekusi kebijakan pembangunan secara otonom, tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Selain itu, PAD juga memungkinkan daerah untuk menyesuaikan

alokasi anggaran dengan prioritas lokal, yang cenderung lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021), Insani et al. (2024), Mahardika dan Fauzan (2022), Saleh (2020), serta Periansya (2019), yang secara konsisten menyatakan bahwa peningkatan PAD berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan kapasitas daerah dalam menggali PAD menjadi langkah strategis untuk mendorong keberlanjutan pembangunan daerah berbasis otonomi yang bertanggung jawab..

#### **4.4.2 Pengaruh DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien regresi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,578, yang berada di atas ambang batas 0,05. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memberikan kontribusi yang signifikan secara parsial terhadap peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Walaupun arah hubungan antara DBH dengan kemandirian keuangan daerah bersifat positif, nilai koefisiennya sangat kecil dan tidak mencapai tingkat signifikansi statistik yang diperlukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh DBH terhadap kapasitas fiskal daerah relatif lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan kata lain, ketergantungan pada DBH sebagai sumber pendapatan daerah belum mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan daerah untuk mendanai pengeluarannya secara mandiri,

sehingga peran DBH dalam konteks peningkatan kemandirian keuangan daerah masih terbatas

Ketidaksignifikanan ini sesuai dengan penelitian Andriana (2020) dan Periansya (2019), yang juga menyimpulkan bahwa kontribusi DBH terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak cukup kuat secara statistik. Beberapa faktor dapat menjelaskan hal ini, antara lain perbedaan distribusi DBH antar daerah, yang dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya dan struktur ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan DBH yang belum optimal menyebabkan alokasi dana tersebut belum sepenuhnya mendukung pemenuhan kebutuhan publik secara efektif, serta belum mampu mendorong penciptaan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

#### **4.4.3 Pengaruh DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan koefisien sebesar 0,045 dengan nilai signifikansi 0,400, yang berada jauh di atas batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun arah hubungan antara DAU dan kemandirian keuangan bersifat positif, pengaruh tersebut tidak signifikan, sehingga DAU tidak dapat diposisikan sebagai determinan utama dalam mendorong otonomi fiskal daerah.

Ketidaksignifikanan tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik mendasar instrumen fiskal ini. DAU berperan utama sebagai alat subsidi yang diarahkan untuk mewujudkan pemerataan fiskal antarwilayah. Oleh karena itu, DAU bukan dirancang sebagai insentif langsung untuk meningkatkan kemampuan finansial

daerah secara mandiri. Dalam praktiknya, ketergantungan yang tinggi terhadap DAU cenderung mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini berpotensi melemahkan insentif bagi daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi fiskal, serta memperbaiki tata kelola anggaran yang berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan fiskal, ketergantungan yang berlebihan pada transfer dana pusat seperti DAU dapat menghambat upaya desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat otonomi daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam mekanisme alokasi dana, yang tidak hanya fokus pada pemerataan, tetapi juga memberikan dorongan yang lebih kuat bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal mereka secara mandiri. Pendekatan ini penting untuk mendorong daerah mengoptimalkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, dan memperkuat kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan mekanisme insentif yang lebih efektif agar daerah terdorong melakukan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setiawan et al. (2021), yang juga menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa alokasi DAU cenderung menciptakan ketergantungan fiskal dibandingkan mendorong pembangunan kapasitas fiskal yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun DAU berperan penting dalam menopang struktur anggaran daerah, perannya dalam meningkatkan

kemandirian fiskal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan desentralisasi fiskal yang mampu mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri dan bertanggung jawab.

#### **4.4.4 Pengaruh DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien 0,020 dan nilai signifikansi 0,316, yang berada di atas batas signifikan 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa DAK tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat korelasi positif, besaran pengaruhnya kurang signifikan untuk dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Fungsi utama Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berperan sebagai dana penugasan teknis menjelaskan mengapa pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah cenderung tidak signifikan. DAK dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan program-program tertentu yang memiliki karakteristik spesifik, terarah, dan bersifat sektoral. Hal ini menyebabkan penggunaannya lebih terbatas pada aspek teknis dan operasional tertentu, bukan pada penguatan kapasitas fiskal secara luas dan menyeluruh di tingkat daerah. Oleh karena itu, meskipun DAK dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam hal penyediaan layanan dasar dan percepatan pembangunan di bidang tertentu,

dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kemandirian finansial daerah tidak bersifat langsung maupun substansial.

Selain itu, karena sifat penggunaannya yang terikat pada kegiatan atau proyek spesifik, DAK lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam struktur pembiayaan daerah, yang membantu menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, DAK tidak dirancang sebagai sumber pendapatan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri, melainkan sebagai alat bantu dalam memenuhi kewajiban dan tugas yang bersifat teknis. Implikasi dari hal ini adalah bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap DAK tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian fiskal, melainkan justru mencerminkan adanya keterbatasan dalam pengembangan sumber-sumber PAD yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Setiawan et al. (2021), yang juga menyatakan bahwa DAK tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya strategi kebijakan yang berfokus pada distribusi dana serta memperkuat pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah secara mandiri agar kemandirian fiskal dapat terwujud secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diperoleh temuan sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD secara substansial berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam mendanai aktivitas pemerintahan tanpa harus bertumpu pada bantuan dari pihak lain.
- 2) Variabel DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun koefisien regresinya positif, nilai signifikansi yang tinggi mengindikasikan bahwa DBH bukan merupakan faktor penting dalam peningkatan otonomi fiskal. Hal tersebut mencerminkan bahwa dana transfer dari pusat yang bersifat bagi hasil belum mampu mendorong daerah untuk lebih mandiri secara keuangan.
- 3) Variabel DAU juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan. Sebagai salah satu komponen utama dana transfer umum dari pemerintah pusat, DAU justru berisiko memperkuat

ketergantungan fiskal daerah, mengingat penggunaannya bersifat bebas dan tidak sepenuhnya diarahkan untuk peningkatan kapasitas PAD.

- 4) Variabel DAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. DAK yang bersifat spesifik dan berorientasi pada penugasan teknis dari pemerintah pusat cenderung tidak memperkuat kapasitas fiskal secara struktural, sehingga tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian keuangan.
- 5) Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah yang bersifat mandiri (PAD) merupakan faktor kunci dalam membangun kemandirian keuangan daerah, sedangkan sumber-sumber dana yang berasal dari pusat, seperti DBH, DAU, dan DAK, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian otonomi fiskal. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan daerah sebaiknya difokuskan pada penguatan kapasitas pengelolaan PAD secara berkelanjutan.

## 5.2 Saran

- 1) Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan diversifikasi jenis dan sumber pajak yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Selain itu, peningkatan efektivitas dalam proses pemungutan pajak menjadi hal yang krusial untuk memperkuat basis fiskal daerah. Dalam konteks tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan potensi sumber daya lokal secara inovatif serta berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi

maksimal terhadap pendapatan daerah. Temuan dari penelitian ini menegaskan kebutuhan akan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih adaptif dan fleksibel, yang tidak hanya memperhatikan aspek pengalihan sumber daya, tetapi juga menitikberatkan pada pencapaian hasil kinerja yang optimal. Dengan demikian, kebijakan tersebut harus dirumuskan sedemikian rupa agar mampu mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

- 2) Untuk penelitian di masa mendatang, direkomendasikan agar menggunakan pendekatan data panel yang mencakup wilayah dengan karakteristik yang lebih beragam guna memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, penting untuk memasukkan variabel tambahan, seperti efisiensi pengeluaran pemerintah daerah maupun kapasitas kelembagaan, sebagai bagian dari model analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai berbagai faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Unsil*, 30-39.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Kaeuangan Negara*, 105-113.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 149-163.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposiun Nasional Keuangan Negara* (hal. 784-799). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 109-125.
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9226-9234.
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 407-416.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi*, 20-36.

- Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh Komponen PAD dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 162-179.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Raden Fatah*, 165-180.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 1-12.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 38-56.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 298-314.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 111-134.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*, 44-53.

- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur*, 303-314.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 11-21.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 143-149.

